## Prabowo Cabut 4 Izin Usaha .....

Dari Halaman 1

Selasa (10/6).

Kementerian ESDM mencatat ada lima perusahaan yang mendapat izin melakukan pengerukan untuk tambang di sekitar wilayah Raja Ampat, Papua Barat.

Dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak 2013.

Tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada 2025.

Pertambangan nikel di Raja Ampat menimbulkan polemik belakangan ini. Bupati Raja Ampat Orideko Burdam menyebut penambangan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Padahal, 97 persen wilayah Raja Ampat merupakan daerah konservasi.

Ia mengeluh tidak bisa berbuat banyak terkait masalah itu.Pasalnya kewenangan penerbitan dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat.

"Sembilan puluh tujuh persen Raja Ampat adalah daerah konservasi sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas," ujar Orideko di Sorong, Sabtu (31/5).

Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia dan empat pemuda Papua pun memprotes keberadaan tambang nikel di Raja Ampat. Protes mereka sampaikan saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno tengah pidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Jakarta, Selasa (3/6).

Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap pertambangan Nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat.

Sejumlah spanduk itu antara lain bertuliskan, "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining". Selain spanduk, mereka turut menerbangkan banner bertuliskan "What's the True Cost of Your Nickel?".

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menemukan pelanggaran serius terhadap empat kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat,

Temuan itu didapat selama proses pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH)/BPH) pada tanggal 26 hingga 31 Mei 2025.

Adapun empat perusahaan tambang nikel yang menjadi objek pengawasan KLH antara lain PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

Sementara, Kementerian ESDM sebelumnya mengklaim tidak menemukan masalah berarti pada pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat.

Informasi disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarnousai bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi kawasan pertambangan di daerah tersebut.

"Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini gak ada masalah," tutur Tri dalam keterangan resmi Sabtu (7/6) seperti dikutip dari website Kementerian ESDM.**(cnni/js)**

## Timwas DPR Usul .....

Dari Halaman 1

hingga Kamis (5/6) pagi waktu Arab Saudi, mereka belum juga diberangkatkan.

"Mereka sudah siap dari hari Rabu pagi, tapi sore belum diangkut, malam belum diangkut, Kamis pagi yang mestinya sudah di Arafah pun belum diangkut juga," kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa (10/6).

Kendala transportasi itu, ucap Fikri, juga berlanjut saat perpindahan jamaah dari Muzdalifah ke Mina untuk melaksanakan lempar jumrah. Karena bus tidak kunjung datang, jamaah akhirnya memutuskan berjalan kaki sejauh 6 hingga 7 kilometer.

"Itu mereka tetap bekerja keras. Bahkan setelah dari Muzdalifah ke Mina, enggak juga dijemput, akhirnya jalan kaki itu 6-7 kilometer. Luar biasa, jalan kaki bersama. Pengorbanan seperti ini mudah-mudahan dinilai oleh Allah SWT sebagai pahala yang luar biasa," ucapnya.

Fikri menilai kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah dengan pihak penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi ternyata tidak dapat dipenuhi dengan baik di lapangan, seperti soal transportasi. Hal itu, kata dia, menyebabkan kekacauan dan ketidaknyamanan yang dirasakan jamaah.

Usul bentuk Pansus Haji 2025

Senada, anggota Timwas Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. **(cnni/js)**

## PT. GAG Buka Suara .....

Dari Halaman 1

Geopark Raja Ampat. Ia menyebut empat pulau utama yang masuk dalam batas Geopark, yakni Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool, tidak mencakup Pulau Gag.

"Karena Pulau Gag berada cukup jauh dari keempat pulau tersebut, kegiatan pertambangan PT Gag Nikel dipastikan tidak berada di zona Geopark Raja Ampat," kata Arya dalam keterangan resmi, Selasa (10/6).

Perusahaan juga menyayangkan beredarnya informasi yang menyebut bahwa aktivitas tambang telah merusak Pulau Gag. Menurut Arya, Gag Nikel telah menerapkan sejumlah sistem pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas air untuk meminimalkan dampak lingkungan.

"Kami sudah melakukan berbagai hal dalam melaksanakan operasional berkelanjutan agar tidak merusak Pulau Gag. Antara lain dalam hal pengelolaan limbah, PT Gag Nikel telah menerapkan prosedur sesuai standar pertambangan yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan sistem drainase, sump pit, dan kolam pengendapan digunakan untuk menampung air larian. Air tersebut kemudian diproses melalui lima kompartemen sebagai filter dan sedimentasi sebelum dilepas ke badan sungai, dengan pengukuran Total Suspended Solids (TSS) dilakukan setiap hari.

Beberapa program lingkungan juga dijalankan perusahaan, di antaranya reklamasi area tambang, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan konservasi terumbu karang. Menurut data perusahaan, hingga akhir 2024 reklamasi telah mencakup 131 hektare (ha), dengan lebih dari 350 ribu pohon ditanam.

Adapun kadar polutan air dan udara dari aktivitas tambang disebut masih di bawah ambang batas. Dalam laporan pemantauan 2024, nilai TSS tercatat antara 5-27 mg/L, pH air limbah berada di kisaran 7-8, dan kadar Chromium VI tercatat antara 0,03-0,07 mg/L.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kegiatan tambang Gag Nikel tidak menunjukkan pencemaran serius berdasarkan hasil inspeksi lapangan pada akhir Mei lalu. Ia menyebut kegiatan operasional masih dalam batas kaidah tata lingkungan.

"Artinya, bahwa tingkat pencemaran (di Raja Ampat) yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius," ujar Hanif di Jakarta, pekan lalu.

Luas total konsesi tambang perusahaan tercatat 6.030 ha, dengan bukaan tambang seluas 187,87 ha. Hanif menambahkan lokasi tersebut berada di kawasan hutan lindung dan termasuk dalam daftar 13 perusahaan yang memperoleh hak khusus melalui relaksasi UU Kehutanan.

"PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Nanti secara teknis tentu Bapak Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) akan memberikan penjelasan kepada kita," ujarnya.

Terkait landasan hukum operasional, Hanif menyebut masih ada ruang untuk pendalaman lebih lanjut, terutama setelah terbitnya dua putusan pengadilan yang memperkuat pelarangan tambang di pulau kecil, yakni Putusan MA Nomor 57P/HUM/2022 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023.

"Putusan MA itu menganggap bahwa pelaksanaan pelarangan kegiatan penambangan di pulau kecil ini dilakukan tanpa syarat. Jadi, tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil ... MK memperkuat putusan MA tersebut," kata Hanif.

Ia menyebut koordinasi lintas kementerian masih diperlukan untuk merumuskan langkah selanjutnya terhadap status operasional GN**.(cnni/js)**

## Ribuan Warga .....

protes yang mendesak pembebasan seluruh kru kapal.

Sejumlah orang juga berkumpul di luar Kantor Luar Negeri Inggris di London untuk mendesak pemerintah melindungi kru kapal berbendera Inggris tersebut.

Beberapa orang juga berdemo di sekitar Kedutaan Besar Israel di Athena, Yunani, usai penangkapan belasan aktivis.

Angkatan laut Israel pada Senin (9/6) membajak kapal kargo Madleen di perairan internasional ketika kapal tersebut berada sekitar 185 kilometer dari Gaza. Kapal ini hendak menuju Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan.

Israel mengonfirmasi pembajakan ini dengan menyatakan bahwa setiap bantuan yang hendak masuk ke Gaza harus melalui Pelabuhan Ashdod. Sebanyak 12 aktivis pun ditangkap dalam peristiwa tersebut.

Lima dari 12 aktivis merupakan warga Prancis. Greta Thunberg, aktivis lingkungan asal Swedia, serta aktivis asal Brasil Thiago Avila termasuk di antara yang ditahan.

Seorang jurnalis Al Jazeera bernama Omar Fayyad juga menjadi salah satu kru kapal yang ditahan pasukan Israel.

Saat ini Greta Thunberg Cs disebut telah berada di Bandara Ben Gurion Israel, untuk dideportasi ke negara asal mereka.

Kapal Madleen berlayar sejak awal Juni untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza lantaran Israel memblokade seluruh bantuan yang masuk.

Belasan aktivis saat ini dikabarkan diminta untuk menandatangani surat deportasi ke negara asal. Empat dari 12 aktivis telah menandatangani surat tersebut. Sementara sisanya menolak pulang sebelum tiba di Gaza. **(cnni/js)**

## Cederai Hak Lingkungan Sehat .....

Dari Halaman 1

kan hak dasar yang menjamin akses masyarakat kepada lingkungan seimbang dan berkelanjutan.

"Aktivitas tambang yang merusak lingkungan tentu saja merupakan tindakan yang mencederai hak atas lingkungan yang baik tersebut," kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6).

Mugiyanto menyebut hak tersebut telah diakui secara nasional maupun internasional dengan tujuan utama melindungi ekosistem dan orang-orang yang tergantung pada lingkungan.

Secara nasional, hak atas lingkungan hidup baik dan sehat diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sementara itu lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari nilai HAM secara internasional telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022.

Mugiyanto mengingatkan Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya poin dua, telah mengamanatkan pemangku kepentingan untuk menindak tegas praktik yang merusak lingkungan.

Poin-poin Astacita, kata dia, juga mencerminkan dorongan untuk dilakukannya upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan yang terdegradasi guna mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.

Oleh sebab itu, Mugiyanto mendukung langkah tegas pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel di Raja Ampat tersebut.

"Kami di Kementerian HAM siap bekerja sama dengan kementerian lingkungan hidup dan kementerian lembaga lainnya untuk mendorong dan memastikan kepatuhan perusahaan agar mematuhi norma-norma HAM," katanya. **(cnni/js)**

## Cadangan Devisa RI Mandek .....

Dari Halaman 1

negeri pemerintah. Ketiga, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

BI menyatakan cadangan devisa pada akhir Mei 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata mereka.

Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan tetap terjaganya prospek ekspor, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik**.(cnni/js)**

## Kasus Laptop Chromebook, Nadiem Gandeng .....

Dari Halaman 1

"Dari kemarin Nadiem ada di Jakarta, dia siap setiap waktu untuk, dia udah bilang tadi kooperatif, gimana DPO? Dia ada disini, sehat walafiat, enggak benar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hotman juga mengklaim Nadiem tidak pernah mengubah kajian terkait laptop chromebook.

Ia mengatakan ada dua kajian berbeda soal laptop chromebook. Pertama saat Nadiem belum menjabat. Kajian terkait laptop chromebook saat itu untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Sementara saat Nadiem menjabat, Kemendikbud Ristek membuat kajian pengadaan laptop chromebook yang ditargetkan bukan untuk daerah 3T.

"Nadiem tidak pernah mengubah kajian, karena kajian yang sebelum kementerian itu sama untuk proyeknya, dua proyek yang berbeda. Jadi tidak bisa dikaitkan satu sama lain, itu inti pokoknya di situ, karena katanya unsur permufakatan jahatnya itu di situ, mengubah kajian bahwa seolah-olah dulu tidak cocok untuk Indonesia, dipaksakan cocok," kata Hotman.

Dalam kasus itu, penyidik Kejagung menemukan indikasi pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan melalui kajian itu dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal, lanjut Harli, uji coba pada 2019 menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.**(cnni/js)**

## Terbit di Masa Kepemimpinan Jokowi .....

Dari Halaman 1

perusahaan itu mulanya dikuasai asing. Pemerintahan Orde Baru alias di akhir kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto yang memberikan kontrak karya untuk perusahaan tersebut.

Kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. PT GAG mengantongi kontrak karya generasi VII No. B53/Pres/I/1998 yang terbit pada 19 Januari 1998 dan ditandatangani Soeharto.

"Kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam," kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).

Tepat setahun setelah kontrak karya dikantongi PT GAG, negara melarang penambangan di hutan lindung melalui UU Kehutanan. Akan tetapi, beleid itu direvisi pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Sebanyak 13 perusahaan pemilik kontrak karya di era Orde Baru mendapat pengecualian dari negara. Melalui UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, GAG dan 12 perusahaan lain diizinkan Megawati melanjutkan kontrak karya yang sudah dipegang.

Di lain sisi, struktur kepemilikan saham PT GAG awalnya terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebesar 75 persen dan sisanya dipegang Antam.

Antam lalu mengakuisisi seluruh saham tersebut pada 2008 sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan perusahaan pelat merah.

Sementara, izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Gag itu terbit di 2017 atau waktu era Kementerian ESDM dikomandoi oleh Ignasius Jonan dan mulai beroperasi setahun kemudian, yakni pada periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) juga sudah dimiliki perusahaan tersebut.

"Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia dan belum masuk di Kabinet (Kabinet Kerja 2014-2019)," kata Bahlil.

Terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menerjunkan tim ke Raja Ampat untuk mengecek lokasi tambang nikel tersebut. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mencatat area penambangan yang dikuasai PT GN di Pulau Gag mencapai 6.030 hektare dengan luas bukaan tambang 187,87 hektare.

Sehingga Bisa Keruk Nikel Raja Ampat

Hanif membenarkan bahwa perizinan yang dikantongi PT GAG Nikel sudah lengkap. Ia menekankan urusan teknis terkait izin pertambangan sudah dipenuhi oleh perusahaan tersebut.

"Segala perizinannya sudah lengkap untuk PT GN (GAG Nikel) ini. Mulai dari IUP, kemudian juga persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai. PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung, nanti secara teknis tentu Bapak Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) akan memberikan penjelasan kepada kita," tuturnya dalam Media Briefing di Hotel Pullman Jakarta, Minggu (8/6).

"Memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya, bahwa tingkat pencemaran (di Raja Ampat) yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius," klaim anak buah Presiden Prabowo Subianto itu.

Meski begitu, Kementerian LH tetap akan meninjau kembali izin lingkungan bagi penambangan PT GAG Nikel.

Ia turut menyinggung Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Hanif menyebut dua putusan itu menegaskan soal larangan kegiatan tambang di pulau kecil.

"Putusan MA itu menganggap bahwa pelaksanaan pelarangan kegiatan penambangan di pulau kecil ini dilakukan tanpa syarat. Jadi, tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil ... MK memperkuat putusan MA tersebut. Artinya, ini ada yurisprudensi hukum bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan ini memang menjadi hal yang dilarang," tegas Hanif.

"Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman dari Kementerian ESDM, (Kementerian) Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melibatkan 3 kementerian. Jadi, tidak kemudian kita langsung ambil langkah," sambungnya selepas acara**.(cnni/js)**

## Antara Tambang dan Amanah Konstitusi

Dari Halaman 1

beroperasi?

Kawasan Raja Ampat adalah geopark global yang bukan hanya kebanggaan Papua Barat Daya atau Indonesia, melainkan juga warisan dunia. Menurut UNESCO, wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Menambang di kawasan seperti ini, meskipun dengan izin formal sekalipun, tetap merupakan bentuk paradoks terhadap komitmen kita terhadap konstitusi dan keberlanjutan.

Pasal 28H UUD 1945 dengan jelas menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Maka pertanyaannya, apakah negara sedang mempertaruhkan hak konstitusional warga demi penerimaan negara bukan pajak dari sektor tambang?

Penghentian izin tambang oleh pemerintah menunjukkan bahwa suara masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil masih bisa didengar. Namun inkonsistensi tetap terlihat. PT Gag Nikel—yang disebut-sebut masih berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat—tetap diberi lampu hijau untuk beroperasi. Padahal, kerusakan ekologis tidak mengenal batas administratif. Satu kawasan rusak akan berdampak sistemik ke kawasan lain, baik dari sisi ekosistem, kearifan lokal, maupun ekonomi berbasis pariwisata lestari.

Kita tentu sadar bahwa tambang nikel adalah bagian dari strategi energi masa depan: bahan baku baterai kendaraan listrik. Tapi masa depan energi tidak boleh dibangun di atas reruntuhan lingkungan dan penderitaan masyarakat lokal. Transisi energi bukan berarti transisi dari batu bara ke perusakan ekologi pesisir dan laut.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan kembali bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah jargon. Ini adalah prinsip etika dan moral dalam tata kelola negara. Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran izin lingkungan dan menolak segala bentuk eksploitasi yang membahayakan kawasan konservasi. Jangan sampai negara seperti berpihak kepada korporasi, sementara masyarakat adat, terumbu karang, dan generasi masa depan justru menjadi korban.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk menata ulang relasi antara investasi dan pelestarian lingkungan. Pilihan ada di tangan kita: menjadi bangsa yang bijak dalam menjaga anugerah Tuhan atau menjadi generasi yang tercatat dalam sejarah sebagai perusak warisan dunia.

Jika benar bahwa tambang yang tersisa masih "legal" secara administratif, maka sudah saatnya kita bertanya: apakah legalitas cukup untuk membenarkan eksploitasi? Di tengah krisis iklim dan degradasi ekosistem global, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan juga moral yang hidup. Dalam moral ekologis, Raja Ampat seharusnya menjadi zona suci: kawasan yang tak bisa ditukar dengan apa pun.

Presiden, menteri terkait, dan pemimpin daerah perlu melihat jauh ke depan. Hentikan semua operasi tambang di Raja Ampat. Biarkan wilayah ini tetap menjadi surga bagi dunia, bukan neraka ekologis karena ambisi industri. Kita bukan hanya menjaga Raja Ampat untuk Papua, tetapi untuk seluruh umat manusia.